

BAB V

ARAH PEMBANGUNAN DAN PERIODESASI RPJPD

A. Arah Pembangunan

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan Provinsi Jawa Timur Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju **masyarakat Makmur dan Berakhlak** dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya perwujudan visi pembangunan Jawa Timur yang dilakukan melalui pelaksanaan misi dan strategi pembangunan yang dilaksanakan melalui tahapan pembangunan jangka menengah dan tahunan.

1. Arah Kebijakan misi Mengembangkan Perekonomian Modern Berbasis Agrobisnis, meliputi :

- a. ***Transformasi Sistem Agrobisnis***, diarahkan pada pengembangan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produksi agrobisnis yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar lokal, nasional dan internasional.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- 1). Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan pasar dan ketahanan pangan termasuk peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan.
- 2). Peningkatan, pemantapan, penguatan dan pelestarian sarana prasarana pertanian dan perdesaan.
- 3). Optimalisasi, pemanfaatan dan keberlanjutan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.
- 4). Optimalisasi, pemanfaatan dan penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparatif menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.

5). Pembangunan

- 5). **Pembangunan Pasar Induk Agribisnis** dan Penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat lemah.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan; kawasan strategis agropolitan (perdesaan); dan pusat distribusinya di kawasan strategis metropolitan (perkotaan).

- b. **Pengembangan Sistem Informasi Agrobisnis** diarahkan pada pembangunan sistem informasi hulu-hilir yang meliputi sarana dan prasarana, produksi, informasi proses produksi, informasi distribusi, dan informasi pengolahan serta informasi pasar.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud adalah :

Pengembangan, peningkatan, penguasaan akses informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar sampai wilayah kecamatan dan kelompok petani.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan strategis ekonomi di pedesaan dan perkotaan/metropolitan.

- c. **Pengembangan Sumberdaya Agrobisnis**, diarahkan pada penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi meliputi aspek bioteknologi, teknologi *eco-farming*, teknologi proses, teknologi produk dan teknologi informasi, guna meningkatkan keunggulan sumberdaya daerah (*comparative advantage*) termasuk kelautan melalui sistem agrobisnis dengan penciptaan nilai tambah yang semakin besar, peningkatan lapangan usaha dan lapangan kerja.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

Penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi meliputi : aspek bioteknologi, teknologi *eco-farming*, teknologi paska panen, teknologi produk, sumberdaya pertanian dan kelautan.

Sedangkan

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra produksi di kawasan strategis agropolitan (perdesaan) dan pusat distribusi di kawasan strategis metropolitan (perkotaan).

- d. ***Pembinaan Sumberdaya Manusia***, diarahkan pada pembangunan SDM sebagai kekuatan utama pembangunan pertanian yang meletakkan etos kerja dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Revitalisasi lembaga penyuluhan.
- 2). Peningkatan kemampuan dan kemandirian petani, dan penguatan lembaga pendukungnya.
- 3). Pemantapan sarana dan prasarana penyuluhan.
- 4). Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM penyuluh.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini di kawasan perdesaan terutama pada kawasan strategis agropolitan.

- e. ***Pembangunan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Pertanian*** diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, diarahkan pada peningkatan fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian guna mendorong perbaikan teknologi produksi dan penciptaan inovasi baru untuk mendorong perekonomian daerah.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- 1). Peningkatan, pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan (litbang) pertanian sampai di tingkat kab/kota.
- 2). Penguasaan inovasi baru teknologi pertanian.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini di kawasan perdesaan terutama pada kawasan strategis agropolitan.

- f. ***Penguatan Struktur Perekonomian***. Penguatan struktur ekonomi daerah berbasis primer yang didukung oleh sektor sekunder dan

tersier

tersier yang diarahkan pada pemantapan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian
- 2). Pemantapan struktur perekonomian yang berkualitas, berdaya saing berbasis agrobisnis.
- 3). Pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan meliputi kawasan strategis agropolitan, kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya di pedesaan.

- g. **Penguatan Struktur Industri**, diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai *leading sector* dalam perekonomian Jawa Timur.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penataan struktur industri berbasis industri kecil dan menengah dalam mata rantai industri hulu dan hilir.
- 2). Pengembangan klaster agroindustri berbasis kekayaan alam daerah.
- 3). Pengembangan dan penguasaan daya saing produk-produk inovatif agroindustri berbahan baku lokal.
- 4). Penguatan kemitraan usaha-usaha ekonomi lokal dengan usaha agroindustri.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan peruntukan Industri dan klaster agroindustri di pedesaan.

- h. **Optimalisasi Perdagangan**, diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri diarahkan pada penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.

Agenda

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pengembangan sistem informasi pasar.
- 2). Perbaikan kerangka regulasi perdagangan.
- 3). Peningkatan dan penguasaan akses dan perluasan pasar ekspor.
- 4). Peningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan perdagangan di kota sedang, besar dan metropolitan.

- i. **Pemberdayaan Koperasi dan UMKM** dalam sistem agrobisnis diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- 1).Peningkatan iklim usaha yang kondusif.
- 2).Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru.
- 3).Pengembangan dan penguatan UKM untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
- 4).Pengembangan dan penguatan usaha skala mikro untuk memberikan kontribusi peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (miskin).
- 5).Penguatan dan peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi SDM dan kemandirian koperasi serta UKM berwawasan gender.
- 6).Penumbuhan dan penciptaan wira usaha baru.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra industri kecil dan kawasan strategis ekonomi di pedesaan dan perkotaan.

- j. **Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan** diarahkan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis

melalui

melalui penyediaan permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Mendorong peran intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM.
- 2). Peningkatan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM.
- 3). Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra koperasi dan UMKM pada kawasan strategis ekonomi di pedesaan dan perkotaan.

- k. ***Percepatan Investasi*** diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi Jawa Timur dengan mengembangkan kebijakan yang pro-pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan *high cost economy* dan penyederhanaan sistem pelayanan investasi.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pelayanan perijinan investasi satu pintu.
- 2). Pelayanan perijinan investasi berbasis teknologi informasi.
- 3). Peningkatan investasi di bidang agroindustri/agrobisnis.
- 4). Pengembangan dan penataan kawasan agropolitan.
- 5). Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi termasuk infrastruktur pertanian dan pedesaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan strategis ekonomi agropolitan di pedesaan dan metropolitan di perkotaan serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

- I. **Pengembangan Pariwisata**, diarahkan untuk mengembangkan dan melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian dan sebagainya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat. Pengembangan pariwisata juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pengembangan dan revitalisi obyek wisata Jawa Timur.
- 2). Pengembangan dan penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.
- 3). Pengembangan paket wisata.
- 4). Optimalisasi promosi dan pengembangan sistem informasi pariwisata.
- 5). Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini kawasan pariwisata.

Indikasi dari keberhasilan misi ini, yaitu tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya kontribusi pangan Jawa Timur terhadap nasional, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya PDRB per kapita dan indeks nilai tukar petani/nelayan (NTP/NTN) dan menurunnya angka pengangguran serta kemiskinan.

2. Arah Kebijakan misi Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya, meliputi :

- a. **Pembangunan Pendidikan** diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dan *outputnya* mampu terserap dalam lapangan kerja.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi:

- 1) Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.

2). Peningkatan

- 2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agrobisnis
- 3) Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan *link and match* khususnya agrobisnis
- 4) Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
- 5) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini pada daerah dengan angka buta huruf tinggi dan IPM rendah.

- b. **Pembangunan Kehidupan Beragama** diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, serta pembentukan akhlak mulia, memupuk etos kerja dan menghargai prestasi.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama.
- 2). Pemantapan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah.
- 3). Pemantapan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- 4). Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini pada daerah dengan kasus konflik umat beragama tinggi.

- c. **Pengembangan Kebudayaan** diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda.
- 2). Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai aset pendidikan dan ilmu pengetahuan.

3). Pengembangan

- 3). Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional.
- 4). Pengembangan publikasi, sosialisasi apresiasi seni budaya.
- 5). Pengembangan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini pada kawasan budaya baik di pedesaan dan perkotaan.

- d. **Pembangunan Pemuda dan Olahraga** diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang memiliki karakter kebangsaan (*nation building*) serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda.
- 2). Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda.
- 3). Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.
- 4). Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang.
- 5). Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga.
- 6). Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi Ibukota Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

- e. **Pemberdayaan Perempuan** diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta perlindungan anak pada suatu kondisi yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak serta tumbuh kembang anak secara wajar.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2). Pencegahan *trafficking* dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3). Peningkatan

- 3). Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
- 4). Penguatan lembaga kesetaraan gender.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah dengan ketimpangan gender, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking* tinggi.

- f. **Pembangunan dan Pemantapan Jatidiri Bangsa** ditujukan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar dari reaktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
- 2). Pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi.
- 3). Pengembangan masyarakat adat.
- 4). Pengembangan nilai budaya daerah.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah perkotaan dan kawasan adat.

Indikator keberhasilan misi mewujudkan SDM yang handal; berakhlak mulia dan berbudaya ditandai dengan menurunnya angka buta huruf; meningkatnya Rasio SMK terhadap SMA; meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS); menurunnya konflik umat beragama; menurunnya indeks kriminalitas, meningkatnya indeks kesetaraan gender; menurunnya angka korban KDRT dan *trafficking*.

3. Arah Kebijakan misi Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses untuk Meningkatkan Kualitas Hidup meliputi :

- a. **Pembangunan Kesehatan** diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- 2). Peningkatkan kesehatan bagi kelangsungan hidup ibu dan anak.
- 3). Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau pada setiap strata pelayanan.
- 4). Peningkatan gizi masyarakat.
- 5). Pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- 6). Pembangunan sistem jaminan kesehatan daerah.
- 7). Pengembangan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan.
- 8). Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 9). Pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- 10). Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan.
- 11). Pemberdayaan institusi kesehatan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi wilayah Selatan Jawa Timur, Madura dan kepulauan serta wilayah dengan IPM rendah.

- b. **Pembangunan Kependudukan** diarahkan pada terwujudnya keluarga sejahtera dan keseimbangan daya dukung lingkungan melalui pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi

- 1). Pembangunan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 2). Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
- 3). Peningkatan persebaran penduduk.
- 4). Penataan administrasi kependudukan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- 5). Pembekalan calon transmigran.
- 6). Pengembangan kualitas penduduk.

Sedangkan

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi dan persebarannya ke wilayah penyangganya (*hinterland*).

- c. **Pembangunan Ketenagakerjaan**, diarahkan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, industrial dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, kompetitif.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penciptaan kesempatan kerja
- 2). Peningkatan kompetensi, daya saing dan sarana prasarana.
- 3). Pelatihan tenaga kerja berbasis potensi kewirausahaan.
- 4). Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja.
- 5). Pelaksanaan hubungan industrial.
- 6). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di daerah maupun di luar negeri.
- 7). Pemantapan kompetensi tenaga kerja melalui kurikulum yang berdaya saing.
- 8). Pengembangan kompetensi berbasis potensi lokal.
- 9). Penanganan pengangguran melalui padat karya

- d. **Pembangunan Kesejahteraan Sosial** diarahkan pada pembangunan kesejahteraan sosial, mengangkat harkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak berdaya dan tidak memiliki akses untuk melakukan mobilitas ke tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- 2). Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan sosial dasar.
- 3). Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- 4). Penanganan dampak sosial bencana.
- 5). Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 6). Pengembangan pembiayaan JAMSOSDA dan perlindungan sosial.

7). Peningkatan

7). Peningkatan keberdayaan sosial yang berbasis masyarakat.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi wilayah Selatan Jawa Timur, Madura dan kepulauan serta wilayah dengan IPM rendah.

e. **Penanggulangan Kemiskinan**, diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan kemudahan untuk akses kualitas hidup berbasis keluarga.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
- 2). Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berbasis individu (tanpa melihat status penyakit).
- 3). Pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat miskin.
- 4). Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.
- 5). Fasilitasi kebutuhan dasar untuk Maskin non produktif.
- 6). Fasilitasi akses layanan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat.
- 7). Penataan dan pengembangan lembaga keuangan mikro untuk mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 8). Pengembangan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar.
- 9). Pengembangan ketrampilan bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha.
- 10). Penguatan lembaga masyarakat (Organisasi Masyarakat Warga).

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini adalah di kawasan tertinggal dan kawasan kumuh (*slum area*) di perkotaan.

Indikasi dari keberhasilan misi ini adalah ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup; menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi; menurunnya prevelensi kurang gizi; menurunnya jumlah

PMKS

PMKS; terkendalnya laju pertumbuhan penduduk; perluasan lapangan kerja; meningkatnya produktifitas tenaga kerja; menurunnya Indeks Kemiskinan.

4. Arah Kebijakan misi Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan, meliputi :

- a. **Pengembangan Keanekaragaman Hayati** diarahkan pada peningkatan nilai tambah potensi sumberdaya alam hayati secara efisien dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- a. Identifikasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati.
- b. Perlindungan potensi plasma nutfah dari klaim-klaim yang dilakukan para pengusaha multinasional (MNCs).
- c. Konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari.
- d. Pengembangan dan peningkatan jumlah patent internasional oleh para pelaku lokal atas pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan lindung, Tahura R. Suryo, hutan kota dan kawasan pesisir pantai.

- b. **Pengembangan Energi** diarahkan dalam rangka pemerataan dan pemenuhan distribusi energi serta diversifikasi atas energi-energi utama dengan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pembangunan, pengembangan dan pendistribusian energi dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.
- 2). Optimalisasi pemanfaatan sumber energi bio dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan serta berasal dari potensi lokal yang tersedia.

Sedangkan

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan perdesaan dan terpencil.

- c. **Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan**, diarahkan untuk memberikan prioritas utama pada kepentingan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Eksploitasi SDA diarahkan untuk mempertimbangkan kepentingan penduduk lokal, kesetabilan daya dukung alam dan reklamasi paska eksploitasi harus dapat dilakukan secara benar.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA terbarukan.
- 2). Identifikasi dan inventarisasi pencemaran dan kerusakan terhadap SDA terbarukan (termasuk tanah dan lahan, udara, hutan).
- 3). Pencegahan, pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan bagi SDA terbarukan.
- 4). Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan lingkungan hidup.
- 5). Rehabilitasi dan pemulihan daya dukung bagi SDA terbarukan.
- 6). Peningkatan kawasan konservasi bagi SDA terbarukan melalui pemberdayaan masyarakat.
- 7). Pengelolaan/pemanfaatan SDA secara optimal dan lestari.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan hutan produksi, konservasi dan hutan lindung serta sekitar kawasan industri.

- d. **Pendayagunaan Sumber Daya Alam Tak-Terbarukan** diarahkan pada pemenuhan kepentingan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan penduduk lokal, kestabilan daya dukung alam dan reklamasi paska eksploitasi yang dilakukan secara benar.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pengendalian lingkungan sekitar kawasan pertambangan yang dieksploitasi.
- 2). Reklamasi pasca eksploitasi untuk memulihkan daya dukung alam.
- 3). Pengendalian lingkungan sekitar kawasan yang dieksploitasi.
- 4). Pemberdayaan masyarakat lokal sekitar kawasan eksploitasi.
- 5). Pemantauan kawasan cekungan air tanah (CAT), peningkatan luasan kawasan hijau, dan pengembangan sumur pantau.
- 6). Pelestarian fungsi daerah tangkapan air untuk menyelamatkan keberadaan air tanah dalam.
- 7). Pengelolaan danau/situ/embung dan pengendalian secara ketat Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan pendekatan *one river, one plan, one management*.
- 8). Peningkatan akses penduduk perkotaan terhadap air bersih.
- 9). Penegakan hukum (*law enforcement*) pada pengelolaan air tanah di kawasan perkotaan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan pertambangan, DAS dan CAT.

- e. **Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan** diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan teknologi.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat.
- 2). Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan estuaria.
- 3). Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di bidang kelautan.

4). Pengembangan

- 4). Pengembangan ekonomi kelautan secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan.
- 5). Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
- 6). Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.
- 7). Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana pesisir dan pencemaran laut.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan pesisir/daerah pantai dan wilayah laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu 4 mil sampai dengan 12 mil laut.

- f. **Penanganan Kebencanaan** diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam mitigasi, penanganan tanggap darurat dan paska bencana.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penataan kelembagaan kebencanaan.
- 2). Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana.
- 3). Pembangunan kembali sarana prasarana publik paska bencana.
- 4). Pengembangan sistem deteksi dini kebencanaan.
- 5). Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana.
- 6). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
- 7). Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat.
- 8). Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan rawan bencana alam , DAS dan Lumpur Lapindo Sidoarjo.

Indikasi dari keberhasilan misi ini ditandai dengan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup; terwujudnya pelestarian fungsi tangkapan air, pengelolaan danau/situ/embung; meningkatnya sumberdaya alam hayati termanfaatkan dan diolah untuk agribisnis; meningkatnya jumlah desa

yang

yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbarukan dan menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumberdaya alam.

5. Arah Kebijakan misi Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi, meliputi :

- a. **Pembangunan Transportasi** diarahkan diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan.
- 2). Mempertahankan kemantapan jaringan jalan.
- 3). Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan Selatan Jawa Timur terutama Jalan Lintas Selatan (JLS), Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, Kawasan Strategis dan wilayah yang terkena bencana.

- b. **Pengelolaan Sumber Daya Air** diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

`Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
- 2). Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan

kebutuhan

kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri) yang adil dan selaras baik antar daerah maupun antar kepentingan.

- 3). Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen DAS.
- 4). Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi sentra produksi pangan (lumbung padi), kawasan strategis, kawasan rawan bencana alam dan kekeringan, kawasan tertinggal dan DAS.

- c. **Perumahan dan Permukiman** diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan rumah serta terbentuknya lingkungan yang sehat sesuai peruntukan dan fungsinya dengan membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat. Disamping itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan persebaran penduduk serta pembangunan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan.
- 2). Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman.
- 3). Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSH) dan Rumah Susun Sederhana (RUSUNA).
- 4). Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara.
- 5). Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan/metropolitan.

- d. **Pengembangan Wilayah**, diarahkan pada terwujudnya percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah didukung infrastruktur ekonomi dalam menopang realisasi pemerataan pembangunan melalui percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pembangunan kawasan strategis, terutama kawasan strategis ekonomi metropolitan, agropolitan dan kawasan tertinggal.
- 2). Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis.
- 3). Pengembangan kawasan andalan.
- 4). Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya.
- 5). Optimalisasi kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*).

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan lindung, kawasan andalan, kawasan strategis dan kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*).

- e. **Penyelenggaraan Penataan Ruang** diarahkan bagi terwujudnya ruang wilayah Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis, berdaya saing global dan berkelanjutan. Untuk kepentingan tersebut sinergi RTRW Provinsi dengan RPJPD Provinsi merupakan kesatuan perencanaan pembangunan daerah yang tak bisa dipisahkan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis.
- 2). Sinkronisasi pemanfaatan ruang antara spasial dan sektoral.
- 3). Pengendalian pemanfaatan ruang, terutama terkait penentuan kebijakan peraturan zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*).

Indikasi dari keberhasilan misi ini, ditandai dengan meningkatnya status kemantapan jalan, meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, berkurangnya kondisi *backlog* perumahan, meningkatnya luas layanan air baku dan berkurangnya ketimpangan antar wilayah.

6. Arah Kebijakan misi Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, meliputi :

- a. **Pembangunan Hukum** diarahkan untuk mewujudkan ketertiban sosial yang dilakukan melalui penegakan supremasi hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif. Disamping itu pembangunan hukum diarahkan juga pada terwujudnya konstruksi hukum yang memberi peluang dan perlindungan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusionalisme, hak-hak asasi manusia, dan hukum yang berkeadilan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penataan produk hukum sesuai hirarki perundang-undangan dan kearifan lokal.
- 2). Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum.
- 3). Pembangunan budaya hukum.
- 4). pengembangan jaringan advokasi hukum pada masyarakat.
- 5). Pengembangan akses masyarakat terhadap keadilan.
- 6). Penegakan supremasi hukum.
- 7). Penghormatan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi.

- b. **Penyelenggaraan Pemerintahan** diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah.
- 2). Pengembangan Diklat Aparatur.

3). Penyusunan

- 3). Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 4). Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi.
- 5). Peningkatan kualitas pelayanan publik yang murah, mudah dan tepat.
- 6). Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-gov; e-procurement; e-bisnis*).
- 7). Pendistribusian kewenangan antar daerah.
- 8). Peningkatan pengawasan aparatur.
- 9). Pengembangan kerja sama antar daerah dan lembaga.
- 10). Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan.
- 11). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 12). Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi ibukota Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

- c. **Pembangunan Politik** diarahkan untuk dapat menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis melalui pelembagaan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, kesantunan sosial, dan budaya Indonesia, hak-hak azasi manusia, dan mengutamakan kepentingan kedaulatan bangsa serta tetap utuh-teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). konsolidasi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya.
- 2). penguatan fungsi partai politik penguatan kelembagaan dan kedewasaan sikap politik masyarakat.
- 3). peningkatan peran perempuan dan pemuda pembangunan politik.
- 4). pengembangan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik.

5). Penguatan

- 5). Penguatan masyarakat sipil dan partai politik dalam proses kebijakan politik.
- 6). Pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan Pancasila.
- 7). Pemantapan peran masyarakat madani.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah rawan konflik politik dan daerah dengan tingkat partisipasi politik rendah.

- d. **Pembangunan Komunikasi dan Informasi** diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi serta menjamin hak masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang transparan menuju proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Pelayanan informasi multi media yang berkualitas.
- 2). Perluasan jaringan dan layanan informasi.
- 3). Fasilitasi masyarakat sadar informasi.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini meliputi daerah akses informasi rendah dan daerah di luar daya pancar alat telekomunikasi.

- e. **Pembangunan Keamanan dan Ketertiban** diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan tegak-tertibnya tatanan sosial kemasyarakatan di samping juga diarahkan untuk terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Penataan kelembagaan dan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- 2). Pengembangan kerja sama dengan aparat kepolisian.
- 3). Pengamanan aset-aset pemerintah.
- 4). Pengembangan budaya hukum.

5). Pengembangan

- 5). Pengembangan sistim keamanan berbasis masyarakat (*community policing*).
- 6). Pengembangan sistim deteksi dini ketentraman lingkungan.
- 7). Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
- 8). Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan prioritas lokasi dari arahan kebijakan ini adalah pada kawasan strategis di pedesaan dan perkotaan.

- f. **Pembangunan Keuangan Daerah** diarahkan pada kemandirian keuangan daerah melalui penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, efisien dan efektif (*value for money*).

Agenda terhadap arah kebijakan dimaksud meliputi :

- 1). Optimalisasi penerimaan sumber sumber keuangan daerah.
- 2). Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah.
- 3). Pengembangan alternatif sumber pembiayaan pembangunan diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 4). Pembiayaan investasi non fasilitas berbasis ekspor.

Indikasi dari keberhasilan misi ini ditandai meningkatnya pelayanan publik, menurunnya kerugian negara, meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya indeks kriminalitas, meningkatnya pendapatan asli daerah serta meningkatnya peranan swasta dalam pembiayaan pembangunan.

B. Periodeasasi RPJPD

Pencapaian visi pembangunan sebagai Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dalam 20 tahun mendatang terbagi atas 4 (empat) tahapan yaitu

tahap

tahap pertama (2005 – 2009), tahap kedua (2010 – 2014), tahap ketiga (2015-2019) dan tahap keempat (2020 – 2024).

1. Tahap Pertama (2005–2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, pembangunan tahap pertama diarahkan untuk menata dan membangun Jawa Timur dengan bertumpu pada pembangunan Agrobisnis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tahap pertama ini, pelbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk menyediakan pondasi atau kerangka dasar bagi kemajuan daerah dalam rangka menopang percepatan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Kerangka dasar kemajuan daerah melalui penguatan kelembagaan dan sarana Agrobisnis.

Kegiatan pada tahap ini diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun pengelolaan. Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Aspek pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumber daya manusia.

Tahap ini diarahkan pada pemulihan kembali kondisi yang ada sehingga kemajuan lebih cepat dicapai. Penurunan kemampuan ekonomi untuk tumbuh mengindikasikan adanya infrastruktur yang melemah daya dukungnya serta tidak berfungsinya mekanisme ekonomi secara optimal.

Untuk itu, pemulihan sarana dan prasarana wilayah serta penambahan infrastruktur memperoleh perhatian utama, sehingga meningkatkan daya dukungnya terhadap kinerja ekonomi. Hal ini harus dilakukan secara simultan baik pada skala Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota Karenanya harus disegerakan penyiapan rencana tindak pemulihan dan pembangunan infrastruktur.

Mekanisme ekonomi dipulihkan dengan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian dan industri. Revitalisasi pertanian terutama dengan meningkatkan produksi pertanian yang didukung

pembangunan

pembangunan infrastruktur dan industri pendukungnya. Revitalisasi pertanian tersebut juga didukung oleh peningkatan konservasi dalam rangka penyediaan air baku bagi kegiatan Agrobisnis.

Revitalisasi industri dilakukan dengan penguatan struktur industri melalui pengembangan kemitraan antara industri kecil menengah dengan industri besar maupun pembentukan klaster industri.

Pada aspek pemerintahan dan aparatur dilakukan dengan pemantapan kinerja Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan aspek politik, hukum dan HAM. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor kunci keberhasilan untuk misi ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah provinsi sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bersamaan dengan itu, tradisi demokrasi dibangun mulai dari tingkat yang paling bawah dengan meletakkan dasar-dasar hubungan sosial yang harmoni dan membangun rasa aman dan saling percaya.

Pada aspek sosial dilakukan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, khususnya pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar 12 tahun. Di bidang kesehatan dilakukan dengan pemberian akses kepada masyarakat miskin rawat inap gratis dan peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas.

2. Tahap Kedua (2010–2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, maka pembangunan tahap kedua ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan produktivitas dan distribusi produk, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Tahap ini ditujukan pada peningkatan kemampuan produksi dan distribusi produk Agrobisnis yang diharapkan dapat mengembangkan

kemajuan

kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan kelanjutan tahapan sebelumnya, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Tahap ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya, termasuk di dalamnya mengoptimalkan aset-aset daerah yang ada untuk kepentingan Agrobisnis melalui mekanisme ekonomi yang sehat, sistem sosial yang padu, tegaknya hukum.

Pada tahap kedua ini, pengembangan Jawa Timur sebagai pusat Agrobisnis diarahkan pada sentra sentra produk pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian di samping perluasan pasar, baik domestik maupun internasional.. Hal ini dilakukan dengan pemberdayaan petani dan lembaga perdesaan, Pengembangan teknologi pertanian, efisiensi jaringan distribusi, penganekaragaman pangan berbasis produk lokal serta penyediaan sarana prasarana produksi. Dengan menempatkan Agrobisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan mengubah proporsi peran Agrobisnis dalam perekonomian. Implikasi lebih lanjut dari reposisi ini adalah realokasi sumberdaya ekonomi yang lebih dominant ke pengembangan Agrobisnis.

Sedangkan pada sektor perdagangan diharapkan dapat mengoptimalkan pasar dalam negeri, penataan distribusi barang dan meningkatkan orientasi ekspor. Di samping itu, optimalisasi sumber daya dilakukan dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi dan meletakkan sistem pengelolaannya yang berkesinambungan. Dalam upaya pemenuhan energi dilakukan dengan meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan.

Pengembangan energi alternatif akan menjadi kebutuhan yang tidak terelakan mengingat kebutuhan energi bagi industri dan rumah tangga di Jawa Timur akan semakin meningkat sementara persediaan terbatas. Oleh karena itu, mulai pada tahap kedua ini akan semakin dikembangkan pelbagai energi alternatif yang ramah lingkungan, mudah dan murah. Semua ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, sehingga penyiapan sumber daya manusia, mulai dilaksanakan

Wajib

Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun dengan fokus pada pengembangan sekolah kejuruan.

Pada pembangunan bidang pariwisata diarahkan dalam rangka meningkatkan keunggulan pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, khas dan berakar pada kekayaan budaya tradisional yang mencerminkan jati diri masyarakat, keragaman kekayaan alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam aspek pengembangan wilayah, kesenjangan antar daerah dikurangi dengan pemerataan pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah. Kondisi ini ditandai dengan pengembangan infrastruktur transportasi yang menjangkau ke daerah-daerah tertinggal. Selain itu pembangunan di kawasan perkotaan diarahkan perkembangannya agar lebih teratur dengan dukungan perangkat manajemen pembangunan wilayah yang dapat mengakomodasi perkembangan kawasan megapolitan dan keserasian hubungan kota besar, menengah, kecil dan wilayah perdesaan yang ada.

Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur pada tahap kedua merupakan pendukung bagi pelaksanaan pembangunan bidang lainnya, karena itu dalam pembangunan pembangunan bidang hukum diarahkan sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang dapat membawa perubahan mendasar sikap aparatur pemerintah dan masyarakat dalam berperan serta dalam setiap aspek pembangunan. Di samping itu juga pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada efektifitas dan peningkatan dayaguna keuangan daerah, penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, peningkatan SDM, penyiapan pranata baik politik, hukum, ketertiban umum, dan aparatur yang dapat mendukung tercapainya visi Jawa Timur 2025. Sedangkan pembangunan politik diarahkan pada pendewasaan masyarakat maupun partai politik dalam membangun demokrasi guna mempertahankan stabilitas dan harmoni sosial.

3. Tahap Ketiga (2015–2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing.

Pada tahap ketiga ini, pembangunan industri diarahkan pada penguatan industri manufaktur sejalan dengan pengembangan kawasan klaster industri yang didukung penciptaan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan mengembangkan industri kecil yang tangguh. Sedangkan pembangunan perdagangan di arahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif melalui perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri.

Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan pendayagunaan kekayaan dan aset dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan fasilitasi kepada daerah dan masyarakat untuk mampu berperan sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdaya masyarakat. Hal ini dilakukan dengan advokasi dan insentif dalam rangka kemandirian, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan umum.

Sedangkan

Sedangkan pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya konstruksi hukum yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan berdasarkan prinsip prinsip konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi.

Untuk pembangunan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perluasan akses transportasi yang menjangkau wilayah perdesaan. Penyelenggaraan pembangunan wilayah didasarkan pada penataan ruang semakin baik dengan meningkatnya implementasi pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan semakin mantapnya sistem pengendalian.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan pada masa yang akan datang.

4. Tahap Keempat (2020–2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, maka pembangunan tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk agrobisnis sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung Agrobisnis tersebut, pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai.

Pada tahap keempat, struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan

Sumber

sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi.

Pada tahap ini, ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta terwujudnya masyarakat informasi; Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian (kawasan Agropolitan). Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi ini diharapkan dapat semakin mendorong terwujudnya kawasan perkotaan tanpa permukiman kumuh.

Pada tahap ini, pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan SDM dalam fasilitasi masyarakat sebagai agen pembaharuan, pemberdaya dan pelayanan umum.

Dalam bidang kelembagaan politik dan hukum telah kondusif yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam pelbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi global.

Pada tahap ini juga, pembangunan dalam bidang kesejahteraan telah mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat yang ditandai semakin meningkatnya fasilitasi lembaga jaminan sosial; kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang

berbasis

berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pentahapan RPJPD Jawa Timur tersebut selanjutnya menjadi acuan Kepala Daerah dalam menyusun skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

PERIODISASI RPJPD PROPINSI JAWA TIMUR

MISI KE 1: Mengembangkan Perekonomian Modern Berbasis Agrobisnis

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
1. <i>Transformasi Sistem Agrobisnis</i> , diarahkan pada pengembangan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produksi agrobisnis yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar lokal, nasional dan internasional.	AGENDA :	AGENDA :	AGENDA :	AGENDA :
	1. Peningkatan produksi pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional, pemenuhan pasar dan ketahanan pangan termasuk peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan.	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan pasar dan ketahanan pangan.	1. Pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal dan regional dan ketahanan pangan.	1. Keberlanjutan pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal, regional dan internasional dan ketahanan pangan.
		2. Peningkatan sarana prasarana pertanian & perdesaan.	2. Pemantapan sarana prasarana pertanian dan perdesaan.	2. Penguatan dan pelestarian sarana prasarana pertanian dan perdesaan.
		3. Pembangunan Pasar Induk Agribisnis.	3. Pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.	3. Keberlanjutan pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.
		4. Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.	4. Penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparative menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.	4. Keberlanjutan penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparative menuju agrobisnis berbasis keunggulan kompetitif.
		5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.	5. Penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat lemah.	

PRIORITAS

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan
2. Pengembangan Sistem Informasi Agrobisnis diarahkan pada pembangunan sistem informasi hulu-hilir yang meliputi sarana dan prasarana, produksi, informasi proses produksi, informasi distribusi, dan informasi pengolahan serta informasi pasar.	AGENDA : Peningkatan sistem informasi produksi dan informasi pasar	AGENDA : Pengembangan sistem informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar	AGENDA : Penguasaan akses informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar sampai wilayah kecamatan	AGENDA : Keberlanjutan penguasaan akses informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar sampai kelompok tani / petani
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis ekonomi di perdesaan • Kawasan perkotaan/ metropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis ekonomi di perdesaan • Kawasan perkotaan/ metropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis ekonomi di perdesaan • Kawasan perkotaan/ metropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis ekonomi di perdesaan • Kawasan perkotaan/ metropolitan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
3. Pengembangan Sumberdaya Agrobisnis , diarahkan pada pemanfaatan dan pengembangan teknologi meliputi aspek bioteknologi, teknologi <i>eko-farming</i> , teknologi proses, teknologi produk dan teknologi informasi, guna meningkatkan keunggulan sumberdaya daerah (<i>comparative advantage</i>) termasuk kelautan melalui sistem agrobisnis dengan penciptaan nilai tambah yang semakin besar, peningkatan lapangan usaha dan lapangan kerja.	AGENDA : Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan sumberdaya agrobisnis	AGENDA : Penelitian, Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengembangan sumberdaya agrobisnis.	AGENDA : Penguasaan, Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi meliputi : aspek bioteknologi, teknologi <i>ekofarming</i> , teknologi pasca panen, teknologi produk	AGENDA : Keberlanjutan penguasaan, pemanfaatan, penelitian dan pengembangan teknologi meliputi : aspek bioteknologi, teknologi <i>ekofarming</i> , teknologi pasca panen, teknologi produk
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis agropolitan di pedesaan • Kawasan strategis metropolitan di perkotaan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
4. Pembinaan Sumberdaya Manusia , diarahkan pada pembangunan SDM sebagai kekuatan utama pembangunan pertanian yang meletakkan etos kerja dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja.	AGENDA : 1. Revitalisasi lembaga penyuluhan 2. Peningkatan kualitas SDM penyuluh.	AGENDA : 1. Peningkatan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya. 2. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh serta SDM penyuluh.	AGENDA : 1. Peningkatan dan pemantapan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya. 2. Pemantapan sarana dan prasarana penyuluh serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh.	AGENDA : 1. Kemandirian petani, dan lembaga pendukungnya. 2. Keberlanjutan pemantapan sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM penyuluh
	PRIORITAS LOKASI: Kawasan strategis agropolitan di pedesaan.	PRIORITAS LOKASI: Kawasan strategis agropolitan di pedesaan.	PRIORITAS LOKASI: Kawasan strategis agropolitan di pedesaan.	PRIORITAS LOKASI: Kawasan strategis agropolitan di pedesaan.
5. Pembangunan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Pertanian diarahkan pada pening-katan fasilitas penelitian dan pengembangan	AGENDA : Peningkatan sarana dan prasarana Litbang pertanian	AGENDA : Pengembangan sarana dan prasarana Litbang pertanian	AGENDA : 1. Pemantapan sarana dan prasarana Litbang pertanian. 2. Penguasaan inovasi baru teknologi pertanian	AGENDA : 1. Pemantapan sarana dan prasarana Litbang pertanian sampai ditingkat kab/kota. 2. Penguasaan inovasi baru teknologi pertanian

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
pertanian guna mendorong perbaikan teknologi produksi dan penciptaan inovasi baru untuk mendorong perekonomian daerah.	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan terutama kawasan agropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan terutama kawasan agropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan terutama kawasan agropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan terutama kawasan agropolitan
6. Penguatan Struktur Perekonomian. Penguatan struktur ekonomi daerah berbasis primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier yang diarahkan pada pemantapan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.	AGENDA : Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian.	AGENDA : 1. Pengembangan keterkaitan sektor primer dengan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis agrobisnis. 2. Pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier	AGENDA : 1. Pemantapan struktur perekonomian yang berkualitas berbasis agrobisnis. 2. Pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier	AGENDA : 1. Perekonomian yang berdaya saing berbasis agrobisnis. 2. Pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan Kawasan andalan Kawasan budidaya lainnya 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan Kawasan andalan Kawasan budidaya lainnya 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan Kawasan andalan Kawasan budidaya lainnya 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan Kawasan andalan Kawasan budidaya lainnya
7. Penguatan Struktur Industri, diarahkan pada pengembangan	AGENDA : Penataan Struktur Industri berbasis industri kecil dan menengah dalam mata	AGENDA : Pengembangan kluster agroindustri berbasis kekayaan alam daerah .	AGENDA : 1. Pengembangan produk-produk inovatif agroindustri berbasis	AGENDA : 1. Penguasaan daya saing produk agroindustri berbasis sumberdaya

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai <i>leading</i> sektor dalam perekonomian Jawa Timur	rantai industri hulu dan hilir		sumberdaya lokal. 2. Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha agro industri	lokal. 2. Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha agro industri
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Kawasan peruntukan Industri• Klaster agroindustri di pedesaan	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Kawasan peruntukan Industri• Klaster agroindustri di pedesaan	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Kawasan peruntukan Industri• Klaster agroindustri di pedesaan	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Kawasan peruntukan Industri• Klaster agroindustri di pedesaan
8. <i>Optimalisasi Perdagangan.</i> diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri diarahkan pada penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.	AGENDA : <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan sistem informasi pasar2. Perbaikan kerangka regulasi perdagangan.	AGENDA : <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor2. Peningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah.	AGENDA : <ol style="list-style-type: none">1. Penguasaan akses dan perluasan pasar ekspor2. peningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah.	AGENDA : <ol style="list-style-type: none">1. Keberlanjutan penguasaan akses dan perluasan pasar ekspor2. peningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Kawasan perdagangan	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Kawasan perdagangan	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Kawasan perdagangan	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Kawasan perdagangan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
9. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam sistem agrobisnis diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.	AGENDA : 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif. 2. Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru.	AGENDA : 1. Pengembangan UKM untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; 2. Pengembangan usaha skala mikro untuk memberikan kontribusi peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (miskin). 3. Penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM koperasi dan UKM berwawasan gender. 4. Penumbuhan dan Penciptaan Wira Usaha baru	AGENDA : 1. Penguatan UKM untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; 2. Penguatan usaha skala mikro untuk memberikan kontribusi peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (miskin). 3. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kompetensi SDM koperasi dan UKM berwawasan gender.	AGENDA : Keberlanjutan kemandirian koperasi dan UMKM yang berdaya saing.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra industri kecil • Kawasan strategis ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra industri kecil • Kawasan strategis ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra industri kecil • Kawasan strategis ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra industri kecil • Kawasan strategis ekonomi •
10. Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan diarahkan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis melalui penyediaan permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM. 2. Peningkatan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Fasilitasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit non komersial untuk koperasi dan UMKM 2. Pengembangan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya keuangan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit non komersial untuk koperasi dan UMKM 2. Penguatan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya keuangan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit non komersial untuk koperasi dan UMKM 2. Pemantapan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya keuangan non perbankan untuk koperasi dan UMKM. 3. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis ekonomi di perdesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis ekonomi di perdesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis ekonomi di perdesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis ekonomi di perdesaan dan perkotaan
11. Percepatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi Jawa Timur dengan mengembangkan kebijakan yang pro-pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan <i>high cost economy</i> dan penyederhanaan sistem pelayanan investasi.	AGENDA : Persiapan Pelayanan Perijinan Investasi satu pintu.	AGENDA : 1. Optimalisasi pelayanan perijinan investasi satu pintu 2. Peningkatan investasi di bidang agroindustri/ agrobisnis, dan pengembangan kawasan agropolitan. 3. Peningkatan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi.	AGENDA : 1. Pengembangan Pelayanan perijinan investasi berbasis Teknologi Informasi. 2. Penataan dan pengembangan kawasan agropolitan. 3. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi	AGENDA : 1. Peningkatan pelayanan perijinan investasi berbasis Teknologi Informasi. 2. Peningkatan penataan dan pengembangan kawasan agropolitan. 3. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi.
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan di perdesaan Kawasan strategis metropolitan di perkotaan Kawasan ekonomi khusus 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan di perdesaan Kawasan strategis metropolitan di perkotaan Kawasan ekonomi khusus 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan di perdesaan Kawasan strategis metropolitan di perkotaan Kawasan ekonomi khusus 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan strategis agropolitan di perdesaan Kawasan strategis metropolitan di perkotaan Kawasan ekonomi khusus

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
12. Pengembangan Pariwisata, diarahkan untuk melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian dan sebagainya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat. Pengembangan pariwisata juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya.	AGENDA : 1. Pengembangan dan revitalisi obyek wisata Jawa Timur 2. Promosi pariwisata daerah. 3. Pengembangan paket wisata	AGENDA : 1. Pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata 2. Promosi pariwisata daerah 3. Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten	AGENDA : 1. Penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata 2. Promosi pariwisata daerah 3. Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten	AGENDA : 1. Keberlanjutan penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata 2. Promosi pariwisata daerah
	PRIORITAS LOKASI : • Kawasan pariwisata	PRIORITAS LOKASI : • Kawasan pariwisata	PRIORITAS LOKASI : • Kawasan pariwisata	PRIORITAS LOKASI : • Kawasan pariwisata

Indikasi dari keberhasilan misi ini, yaitu tercapainya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, meningkatnya kontribusi pangan Jawa Timur terhadap nasional, meningkatnya PDRB dan PDRB per kapita, membaiknya indeks nilai tukar petani/nelayan (NTP / NTN) serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

MISI KE 2 : Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
1. Pembangunan Pendidikan diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dan <i>outputnya</i> mampu terserap dalam lapangan kerja.	AGENDA :	AGENDA :	AGENDA :	AGENDA :
	1. Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan.	1. Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.	1. Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.	1. Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.
	2. Peningkatan kuantitas pendidikan SMK	2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agrobisnis	2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agrobisnis	2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agrobisnis
	3. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	3. Peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan <i>link and match</i> khususnya agrobisnis	3. Peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan <i>link and match</i> khususnya agrobisnis	3. Peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan <i>link and match</i> khususnya agrobisnis
		4. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.	4. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.	4. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
		5. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.	5. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.	5. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan angka buta huruf tinggi dan IPM Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan angka buta huruf tinggi dan IPM Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan angka buta huruf tinggi dan IPM Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan angka buta huruf tinggi dan IPM Rendah
<p>2. Pembangunan Kehidupan Beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, serta pembentukan akhlak mulia, memupuk etos kerja dan menghargai prestasi.</p>	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah; Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama Pemantapan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah; Pemantapan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelestarian kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama Pemantapan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah; Pemantapan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan kasus konflik umat beragama tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan kasus konflik umat beragama tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan kasus konflik umat beragama tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan kasus konflik umat beragama tinggi
3. <i>Pembangunan Kebudayaan</i> diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda; 2. Pengembangan dan melestarikan budaya lokal dan tradisional. 3. Peningkatkan publikasi, sosialisasi, dan pagelaran apresiasi seni budaya; 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda; 2. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dan tradisional. 3. Mengembangkan publikasi, sosialisasi, apresiasi seni budaya; 4. Mengembangkan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat 5. Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan. 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda; 2. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dan tradisional. 3. Mengembangkan publikasi, sosialisasi, apresiasi seni budaya; 4. Mengembangkan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat 5. Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan. 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda; 2. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dan tradisional. 3. Mengembangkan publikasi, sosialisasi, apresiasi seni budaya; 4. Mengembangkan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat 5. Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan budaya baik di pedesaan dan perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan budaya baik di pedesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan budaya baik di pedesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan budaya baik di pedesaan dan perkotaan
4. Pembangunan Pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia.	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan. 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda; Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda olahraga Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan dan Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan dan Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan dan Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan dan Kabupaten/Kota
5. <i>Pemberdayaan Perempuan</i> diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta perlindungan anak pada suatu kondisi yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak serta tumbuh kembang anak secara wajar.	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender Pencegahan <i>trafficking</i> dan kekerasan terhadap perempuan dan anak 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan; Pencegahan <i>trafficking</i> dan kekerasan terhadap perempuan dan anak Penguatan lembaga kesetaraan gender 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> Penguatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan; Pencegahan <i>trafficking</i> dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penguatan lembaga kesetaraan gender 	<ol style="list-style-type: none"> Pemantapan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan di bidang agribisnis; Pencegahan <i>trafficking</i> dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan ketimpangan gender tinggi. Daerah dengan kasus KDRT dan <i>trafficking</i> tinggi. 	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan ketimpangan gender tinggi. Daerah dengan kasus KDRT dan <i>trafficking</i> tinggi. 	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan ketimpangan gender tinggi. Daerah dengan kasus KDRT dan <i>trafficking</i> tinggi. 	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> Daerah dengan ketimpangan gender tinggi. Daerah dengan kasus KDRT dan <i>trafficking</i> tinggi.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
6. Pembangunan Jatidiri Bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar dari reaktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi. 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi. 3. Pengembangan masyarakat adat. 4. Pengembangan nilai budaya daerah. 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. 2. Peningkatan pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi. 3. Penguatan masyarakat adat. 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pembangunan karakter dan pekerti bangsa. 2. Penguatan pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi. 3. Penguatan fungsi masyarakat adat di bidang agrobis.
	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> • Daerah perkotaan dan kawasan adat 	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> • Daerah perkotaan dan kawasan adat 	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> • Daerah perkotaan dan kawasan adat 	PRIORITAS LOKASI <ul style="list-style-type: none"> • Daerah perkotaan dan kawasan adat

Indikator keberhasilan misi Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya ditandai menurunnya angka buta huruf; meningkatnya Rasio SMK terhadap SMA; meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS); menurunnya konflik umat beragama; menurunnya indeks kriminalitas, meningkatnya indeks kesetaraan gender; menurunnya angka korban KDRT dan trafficking;

MISI KE 3 : Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
1. Pembangunan Kesehatan , diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.	AGENDA : 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 2. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	AGENDA : 1. Peningkatkan kesehatan bagi kelangsungan hidup ibu dan anak 2. Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau pada setiap strata pelayanan 3. Peningkatan gizi masyarakat 4. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 5. Pembangunan sistem jaminan kesehatan daerah 6. Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan	AGENDA : 1. Pengembangan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan 2. Pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 3. Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan 4. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	AGENDA : 1. Pengembangan dan penguatan sistem kesehatan 2. Pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) 3. Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan, Madura dan Kepulauan dan wilayah dengan IPM Rendah 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan, Madura dan Kepulauan dan wilayah dengan IPM Rendah 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan, Madura dan Kepulauan dan wilayah dengan IPM Rendah 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan, Madura dan Kepulauan dan wilayah dengan IPM Rendah

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
2. <i>Pembangunan Kependudukan</i> , diarahkan pada terwujudnya keluarga sejahtera dan keseimbangan daya dukung lingkungan melalui pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk.	AGENDA : 1. Pembangunan kependudukan dan keluarga berkualitas 2. Pembekalan calon transmigran	AGENDA : 1. Pengendalian laju pertumbuhan Penduduk 2. Peningkatan persebaran penduduk 3. Penataan administrasi kependudukan	AGENDA : 1. Pengendalian laju pertumbuhan Penduduk 2. Peningkatan persebaran penduduk	AGENDA : 1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk 2. Pengembangan kualitas penduduk
	PRIORITAS LOKASI: • Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi	PRIORITAS LOKASI: • Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi	PRIORITAS LOKASI: • Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi	PRIORITAS LOKASI: • Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi
3. <i>Pembangunan Ketenagakerjaan</i> , diarahkan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Industrial dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, kompetitif.	AGENDA : 1. Penciptaan kesempatan kerja 2. Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja 3. Pelaksanaan hubungan industrial.	AGENDA : 1. Peningkatan kompetensi, daya saing dan sarana prasarana 2. Pelatihan tenaga kerja yg berbasis potensi kewirausahaan 3. Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja 4. Perlindungan bagi tenaga kerja di daerah	AGENDA : 1. Pemantapan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja serta hubungan industrial 2. Pemantapan kompetensi tenaga kerja melalui kurikulum yg berdaya saing 3. Perlindungan bagi tenaga kerja di luar negeri	AGENDA : 1. Pengembangan pelaksanaan hubungan industrial, buruh dan pemerintah 2. pengembangan kompetensi berbasis potensi lokal 3. Perlindungan bagi tenaga kerja

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
		5. Penanganan pengangguran melalui padat karya	4. Penanganan pengangguran melalui padat karya	
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Perkotaan dan perdesaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Perkotaan dan perdesaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Perkotaan dan perdesaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Perkotaan dan perdesaan
4. <i>Pembangunan Kesejahteraan Sosial</i> , diarahkan pada peningkatan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tidak berdaya dan tidak memiliki akses untuk melakukan mobilitas ke tingkat kualitas kehidupan yg lebih baik	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan produktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan sosial dasar Peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) Penanganan dampak sosial bencana 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial Peningkatan fasilitasi pelayanan sosial dasar untuk PMKS Sistem pembiayaan jaminan sosial daerah bagi PMKS 	AGENDA : <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan pembiayaan JAMSOSDA dan perlindungan sosial Peningkatan keberdayaan sosial yang berbasis masyarakat
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan Jawa Timur, Madura, wilayah dengan IPM Rendah serta wilayah terkena bencana 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan Jawa Timur, Madura, wilayah dengan IPM Rendah serta wilayah terkena bencana 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan Jawa Timur, Madura, wilayah dengan IPM Rendah serta wilayah terkena bencana 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah Selatan Jawa Timur, Madura, wilayah dengan IPM Rendah serta wilayah terkena bencana

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
5. Penanggulangan Kemiskinan , diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan kemudahan untuk akses kualitas hidup berbasis keluarga.	AGENDA : 1. Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 2. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat	AGENDA : 1. Pelayanan kesehatan bebas biaya bagi masyarakat miskin berbasis individu (tanpa melihat status penyakit) 2. Pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat miskin 3. Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin 4. Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif 5. Fasilitasi akses layanan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat 6. Penataan dan pengembangan lembaga keuangan mikro untuk mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) 7. Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat	AGENDA : 1. Peningkatan pelayanan kesehatan bebas biaya bagi masyarakat miskin berbasis individu (tanpa melihat status penyakit) 2. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat miskin 3. Fasilitasi akses anak masyarakat miskin yang berprestasi ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi. 4. Stimulasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin 5. Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif 6. Penguatan lembaga masyarakat (Organisasi Masyarakat Warga)	AGENDA : 1. Pemantapan pelayanan kesehatan bebas biaya bagi masyarakat miskin berbasis individu (tanpa melihat status penyakit) 2. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat miskin 3. Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif 4. Pengembangan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar. 5. Pengembangan ketrampilan bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
		8. Penguatan lembaga masyarakat (Organisasi Masyarakat Warga)		
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan tertinggal dan kawasan tumbuh perkotaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan tertinggal dan kawasan tumbuh perkotaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan tertinggal dan kawasan tumbuh perkotaan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan tertinggal dan kawasan tumbuh perkotaan

Indikasi dari keberhasilan misi ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup; menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi; menurunnya prevalensi kurang gizi; menurunnya jumlah PMKS; Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; Perluasan lapangan kerja; Meningkatnya produktifitas tenaga kerja; Menurunnya indeks kemiskinan.

MISI KE 4: Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
1. Pengembangan Keanekaragaman Hayati diarahkan pada peningkatan nilai tambah potensi sumberdaya alam hayati secara efisien dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.	AGENDA: 1. Identifikasi dan Inventarisasi keanekaragaman hayati	AGENDA: 1. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati 2. Perlindungan potensi plasma nutfah dari klaim-klaim yang dilakukan para pengusaha multinasional (MNCs). 3. Upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati	AGENDA: 1. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati dengan teknologi bio (<i>biotech</i>) dan peningkatan perlindungan potensi plasma nutfah atas klaim-klaim yang dilakukan pengusaha multinasional (MNCs). 2. Konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan secara lestari 3. Pemanfaatan Keanekaragaman hayati secara lestari 4. Konservasi Keanekaragaman hayati	AGENDA: 1. Pengembangan dan peningkatan jumlah patent internasional oleh para pelaku local atas pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati. 2. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari 3. Peningkatan nilai tambah Keanekaragaman hayati.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan lindung, Tahura R. Suryo, hutan kota, kawasan pesisir pantai 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan lindung, Tahura R. Suryo, taman nasional Bromo Tengger Semeru (BTS), taman nasional baluran, hutan Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan lindung, Tahura R. Suryo, taman nasional Bromo Tengger Semeru (BTS), taman nasional baluran, hutan Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan lindung, Tahura R. Suryo, taman nasional Bromo Tengger Semeru (BTS), taman nasional baluran, hutan Kota
2. Pengembangan Energi diarahkan dalam rangka pemerataan dan pemenuhan distribusi energi di samping juga diversifikasi atas energi utama dengan energi terbarukan yang lebih bersih	AGENDA: Pemenuhan distribusi energi dan pengembangan energi alternatif (bersih) yang terbarukan.	AGENDA: Pembangunan, Pengembangan dan pendistribusian energi alternatif yang ramah lingkungan.	AGENDA: Peningkatan pemanfaatan energi bio dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan.	AGENDA: Optimalisasi pemanfaatan energi bio dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan.
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan dan terpencil. 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan dan perkotaan. 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan dan perkotaan. 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdesaan dan perkotaan.
3. Pendayagunaan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan pada upaya merehabilitasi dan memulihkan daya	AGENDA: 1. Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA terbarukan 2. Identifikasi dan Inventarisasi pencemaran dan	AGENDA: 1. Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian pencemaran dan kerusakan bagi SDA terbarukan	AGENDA: 1. Rehabilitasi dan pemulihan daya dukung serta pengelolaan SDA terbarukan 2. Pemanfaatan SDA terbarukan secara	AGENDA: 1. Pemanfaatan SDA secara optimal dan lestari 2. Peningkatan kawasan konservasi bagi SDA terbarukan melalui

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
dukungnya dan kemudian pada pemanfaatan aspek-aspek tidak kasat mata, seperti jasa lingkungan sehingga memungkinkan tercapainya suatu situasi dimana pemenuhan kebutuhan masa kini dapat dicapai secara baik dan efisien serta tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.	perusakan terhadap SDA terbarukan (termasuk tanah & lahan, udara, hutan)	2. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan 3. Rehabilitasi & Pemulihan daya dukung bagi SDA terbarukan 4. Pengelolaan SDA terbarukan	optimal dan lestari	pemberdayaan masyarakat
	PRIORITAS LOKASI: Kawasan hutan produksi, konservasi, hutan lindung dan sekitar kawasan industri	PRIORITAS LOKASI: Kawasan hutan produksi, konservasi, hutan lindung dan sekitar kawasan industri	PRIORITAS LOKASI: Kawasan hutan produksi, konservasi, hutan lindung dan sekitar kawasan industri	PRIORITAS LOKASI: Kawasan hutan produksi, konservasi, hutan lindung dan sekitar kawasan industri
4. Pendayagunaan Sumberdaya Alam Tak-Terbarukan. diarahkan pada pemenuhan kepentingan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan penduduk	AGENDA: 1. Reklamasi paska eksploitasi untuk memulihkan daya dukung alam 2. pengendalian lingkungan sekitar kawasan yang dieksploitasi dan pemberdayaan masyarakat lokal sekitar kawasan eksploitasi. 3. Pemantauan kawasan	AGENDA: 1. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan eksploitasi, reklamasi paska eksploitasi 2. pengendalian secara ketat kawasan-kawasan kritis. 3. Pelestarian fungsi daerah tangkapan air untuk menyelamatkan keberadaan air tanah	AGENDA: 1. Pengendalian secara ketat kawasan-kawasan eksploitasi sumberdaya alam, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan yang dieksploitasi dan reklamasi serta pemulihan kawasan pasca eksploitasi. 2. Pelestarian fungsi daerah tangkapan air,	AGENDA: 1. Peningkatan dan prioritas kepentingan kestabilan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. 2. Pelestarian fungsi daerah tangkapan air, peningkatan efisiensi penggunaan air di kawasan pertanian,

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
lokal, kestabilan daya dukung alam dan reklamasi paska eksploitasi yang dilakukan secara benar.	CAT (cekungan air tanah), peningkatan luasan kawasan hijau, dan pengembangan sumur pantau.	dalam, 4. pengelolaan danau/situ/embung dan pengendalian secara ketat DAS dengan pendekatan <i>one river, one plan, one management</i> .	3. pengelolaan danau/situ/embung, pengendalian DAS secara ketat dengan pendekatan <i>one river, one plan, one management</i> serta peningkatan akses penduduk terhadap air bersih, terutama di kawasan perkotaan.	pengelolaan danau/situ/embung, pengendalian secara ketat DAS, 3. peningkatan akses penduduk perkotaan terhadap air bersih, dan 4. law enforcement pada pengelolaan air tanah di kawasan perkotaan.
	PRIORITAS LOKASI: • Kawasan pertambangan, DAS dan CAT	PRIORITAS LOKASI: • Kawasan pertambangan, DAS dan CAT	PRIORITAS LOKASI: • Kawasan pertambangan, DAS dan CAT	PRIORITAS LOKASI: • Kawasan pertambangan, DAS dan CAT
5. Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek	AGENDA: 1. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat. 2. Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di	AGENDA: 1. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat. 2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang	AGENDA: 1. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak. 2. Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di bidang kelautan.	AGENDA: 1. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat. 2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
sumber daya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan teknologi.	bidang kelautan. 3. Pengembangan ekonomi kelautan secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan. 4. Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.	rusak. 3. Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di bidang kelautan. 4. Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir. 5. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana pesisir dan pencemaran laut	3. Pengembangan ekonomi kelautan secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan. 4. Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 5. Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir. 6. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana pesisir dan pencemaran laut	rusak. 3. Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di bidang kelautan. 4. Pengembangan ekonomi kelautan secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan. 5. Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 6. Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir. 7. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana pesisir dan pencemaran laut
	PRIORITAS LOKASI: • Daerah pantai 4 sampai dengan 12 mil laut	PRIORITAS LOKASI: • Daerah pantai 4 sampai dengan 12 mil laut	PRIORITAS LOKASI: • Daerah pantai 4 sampai dengan 12 mil laut	PRIORITAS LOKASI: • Daerah pantai 4 sampai dengan 12 mil laut

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
6. Penanganan Kebencanaan diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam penanganan pra, darurat dan paska bencana.	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kelembagaan kebencanaan 2. Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana 3. Pembangunan kembali sarana prasarana publik. 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem deteksi dini kebencanaan; 2. Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat. 3. Rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana. 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana 2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat. 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana. . 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem deteksi dini kebencanaan; 2. Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana 3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat. 5. Rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan rawan bencana alam • DAS 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan rawan bencana alam • DAS • Kawasan Lumpur Lapindo Sidoarjo. 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan rawan bencana alam • DAS • Kawasan Lumpur Lapindo Sidoarjo. 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan rawan bencana alam • DAS

Indikasi dari keberhasilan misi Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan ditandai dengan Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup; terwujudnya pelestarian fungsi tangkapan air, pengelolaan danau/situ/embung; meningkatnya sumberdaya alam hayati termanfaatkan dan diolah untuk agribisnis; meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbarukan dan menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumberdaya alam.

MISI KE 5 : Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
1. <i>Pembangunan Transportasi</i> diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan.	AGENDA : 1. Penanganan seluruh jaringan jalan, terutama yang kondisinya kritis, rusak akibat bencana 2. pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda	AGENDA : 1. Mempertahankan kemantapan jaringan jalan dan jembatan. 2. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan 3. Pemeliharaan, peningkatan, pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda	AGENDA : 1. Mempertahankan kemantapan jaringan jalan, 2. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan 3. Pemeliharaan, peningkatan, pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda	AGENDA : 1. Mempertahankan kemantapan jaringan jalan, 2. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan 3. Pemeliharaan, peningkatan, pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermoda
	LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis • Kawasan Selatan Jawa Timur terutama JLS • Daerah yang terkena bencana. 	LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis • Kawasan Selatan Jawa Timur • Kawasan Kaki Jembatan Suramadu • Daerah yang terkena bencana. 	LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis • Kawasan Selatan Jawa Timur • Kawasan Kaki Jembatan Suramadu • Daerah yang terkena bencana. 	LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis • Kawasan Selatan Jawa Timur • Daerah yang terkena bencana.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
2. Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan Konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.	AGENDA :	AGENDA :	AGENDA :	AGENDA :
	1. Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.	1. Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.	1. Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.	1. Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
	2. Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri).	2. Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri).	2. Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri).	2. Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri).
	3. Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen daerah aliran sungai (DAS)	3. Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen DAS	3. Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen DAS	3. Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen DAS
	4. Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	4. Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	4. Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	4. Penataan kelembagaan, keterpaduan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI	PRIORITAS LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pangan (lumbung padi) • Kawasan strategis • Kawasan rawan bencana alam dan kekeringan • Kawasan tertinggal • DAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pangan (lumbung padi) • Kawasan strategis • Kawasan rawan bencana alam dan kekeringan • Kawasan tertinggal • DAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pangan (lumbung padi) • Kawasan strategis • Kawasan rawan bencana alam dan kekeringan • Kawasan tertinggal • DAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra produksi pangan (lumbung padi) • Kawasan strategis • Kawasan rawan bencana alam dan kekeringan • Kawasan tertinggal • DAS
<p>3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan rumah serta terbentuknya lingkungan yang sehat sesuai peruntukan dan fungsinya dengan membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat. Disamping itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman juga</p>	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, 3. Pembangunan RSH dan RUSUNA, 4. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara 5. Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman. 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, 3. Pembangunan RSH dan RUSUNA, 4. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara 5. Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman. 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, 3. Pembangunan RSH dan RUSUNA, 4. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara 5. Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman. 	<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan 2. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, 3. Pembangunan RSH dan RUSUNA, 4. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara 5. Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman.

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan persebaran penduduk serta pembangunan.	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan • Kawasan perkotaan/metropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan • Kawasan perkotaan/metropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan • Kawasan perkotaan/metropolitan 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perdesaan • Kawasan perkotaan/metropolitan
4. Pengembangan Wilayah , diarahkan pada terwujudnya percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah didukung infrastruktur ekonomi dalam menopang realisasi pemerataan pembangunan melalui percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kawasan strategis diprioritaskan 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis diprioritaskan 3. Pembangunan kawasan pengembangan utama 4. Pengelolaan kawasan lindung 5. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan strategis, utamanya kawasan strategis ekonomi metropolitan, agropolitan dan kawasan tertinggal 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis 3. Pengembangan kawasan andalan 4. Pengelolaan kawasan lindung 5. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan strategis, utamanya kawasan strategis ekonomi metropolitan, agropolitan dan kawasan tertinggal 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis 3. Pengembangan kawasan andalan 4. Pengelolaan kawasan lindung 5. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan strategis, utamanya kawasan strategis ekonomi megapolitan, agropolitan dan kawasan tertinggal 2. Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis 3. Pengembangan kawasan andalan 4. Pengelolaan kawasan lindung 5. Optimalisasi kawasan pengendalian ketat

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan andalan • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan andalan • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan andalan • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung • Kawasan andalan • Kawasan strategis • Kawasan pengendalian ketat
5. Pembangunan Penataan Ruang diarahkan bagi terwujudnya ruang wilayah Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis, berdaya saing global dan berkelanjutan.	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 3. Pengendalian pemanfaatan ruang, terkait penentuan kebijakan peraturan zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi. 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 3. Pengendalian pemanfaatan ruang, terkait penentuan kebijakan peraturan zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 3. Pengendalian pemanfaatan ruang, terkait penentuan kebijakan peraturan zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi 	AGENDA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 3. Pengendalian pemanfaatan ruang, terkait penentuan kebijakan peraturan zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:	PRIORITAS LOKASI:
	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan lindung• Kawasan budidaya• Kawasan strategis• Kawasan pengendalian ketat	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan lindung• Kawasan budidaya• Kawasan strategis• Kawasan pengendalian ketat	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan lindung• Kawasan budidaya• Kawasan strategis• Kawasan pengendalian ketat	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan lindung• Kawasan budidaya• Kawasan strategis• Kawasan pengendalian ketat

Indikasi dari keberhasilan misi Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi ditandai dengan meningkatnya status kemantapan jalan, meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, berkurangnya kondisi backlog perumahan, meningkatnya luas layanan air baku serta berkurangnya ketimpangan antar wilayah.

MISI KE 6 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
1. Pembangunan Hukum diarahkan untuk mewujudkan ketertiban sosial yang dilakukan melalui penegakan supremasi hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif.	AGENDA 1. Penataan produk hukum sesuai hirarki perundang-undangan dan kearifan lokal. 2. Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum.	AGENDA 1. Penegakan supremasi hukum dan HAM 2. Pembangunan budaya hukum 3. Harmonisasi produk hukum 4. pengembangan jaringan advokasi hukum pada masyarakat.	AGENDA 1. Pengembangan akses masyarakat terhadap keadilan. 2. Pembangunan budaya hukum.	AGENDA 1. Penegakan supremasi hukum dan HAM 2. penghormatan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan.
	PRIORITAS LOKASI: • Daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi	PRIORITAS LOKASI: • Daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi	PRIORITAS LOKASI: • Daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi	PRIORITAS LOKASI: • Daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi
2. Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu	AGENDA 1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah 2. Pengembangan diklat aparatur 3. Penyusunan dan penerapan standart pelayanan minimal	AGENDA 1. Pelayanan publik 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-gov; e-procurement; e-bisnis) 3. Pendistribusian	AGENDA 1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Pengawasan aparatur 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam	AGENDA 1. Pengawasan aparatur 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 3. Pengembangan kerja sama antar daerah dan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	4. Peningkatan kinerja birokrasi 5. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. 6. Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan 7. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	kewenangan, 4. Pengawasan aparatur 5. Standarisasi kompetensi jabatan 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 7. Pengembangan kerja sama antar daerah dan lembaga 8. Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan. 9. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	penyelenggaraan pemerintahan 4. Pengembangan kerja sama antar daerah dan lembaga 5. Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan 6. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	lembaga 4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi 	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
3. Pembangunan Politik diarahkan untuk dapat menjamin terselenggara ranya tata pemerintahan yang demokratis melalui pelembagaan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, kesian-tunan sosial, dan budaya Indonesia, hak-hak azasi manusia, dan mengutamakan kepentingan kedaulatan bangsa serta tetap utuh-teguhnya negara kesatuan Republik	AGENDA 1. Konsolidasi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesantunan sosial, moralitas dan budaya.	AGENDA 1. Penguatan fungsi partai politik penguatan kelembagaan dan kedewasaan sikap politik masyarakat 2. Peningkatan peran perempuan dan pemuda, 3. Perluasan akses masyarakat terhadap kebijakan politik	AGENDA 1. Pengembangan budaya politik baik pada masyarakat maupun lembaga politik. 2. Penguatan masyarakat sipil dan partai politik dalam proses kebijakan politik	AGENDA 1. Pelembagaan nilai nilai demokrasi 2. Pemantapan peran masyarakat madani.
	PRIORITAS LOKASI: • Daerah rawan konflik	PRIORITAS LOKASI: • Daerah dengan tingkat partisipasi politik rendah	PRIORITAS LOKASI: • Daerah dengan tingkat partisipasi politik rendah	PRIORITAS LOKASI: • Daerah dengan tingkat partisipasi politik rendah

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
4. Pembangunan Komunikasi dan Informasi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi serta menjamin hak masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang transparan menuju proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik.	AGENDA Pelayanan informasi multi media yang berkualitas	AGENDA 1. Pelayanan informasi multi media yang berkualitas 2. Perluasan jaringan dan layanan informasi	AGENDA 1. Pelayanan informasi multi media yang berkualitas 2. Perluasan jaringan dan layanan informasi 3. Fasilitasi masyarakat sadar informasi	AGENDA 1. Pelayanan informasi multi media yang berkualitas 2. Perluasan jaringan dan layanan informasi 3. Fasilitasi masyarakat sadar informasi
	PRIORITAS LOKASI : <ul style="list-style-type: none">• Daerah akses informasi rendah• Daerah diluar daya pancar alat telekomunikasi	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Daerah akses informasi rendah• Daerah diluar daya pancar alat telekomunikasi	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Daerah akses informasi rendah• Daerah diluar daya pancar alat telekomunikasi	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Daerah akses informasi rendah• Daerah diluar daya pancar alat telekomunikasi
5. Pembangunan Keamanan dan Ketertiban diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan tegak-tertibnya tatanan sosial kemasyarakatan	AGENDA 1. Penataan kelembagaan dan profesionalisme Satpol PP 2. Pengembangan kerja sama dengan aparat kepolisian	AGENDA 1. Pengamanan aset aset Pemerintah 2. Pengembangan budaya hukum 3. Pengembangan sistim keamanan berbasis masyarakat (<i>community policing</i>) 4. Pencegahan dan	AGENDA 1. Pengembangan sistim deteksi dini. 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban 3. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan	AGENDA Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
		pemberantasan penyalahgunaan narkoba	narkoba	
	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Daerah rawan konflik• Daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi• Daerah rawan bencana	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Daerah rawan konflik• Daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi• Daerah rawan bencana	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Daerah rawan konflik• Daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi• Daerah rawan bencana	PRIORITAS LOKASI: <ul style="list-style-type: none">• Daerah rawan konflik• Daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi• Daerah rawan bencana
6. Pembangunan Keuangan Daerah diarahkan pada kemandirian keuangan daerah melalui penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip-prinsip akuntabel, transparan,	AGENDA <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan manajemen pengelolaan sumber - sumber keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas2. Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan3. Penggalan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan di luar PAD	AGENDA <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan manajemen pengelolaan sumber - sumber keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas2. Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah3. Peningkatan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembanguna di luar PAD4. Optimalisasi pembiaya-	AGENDA <ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi manajemen pengelolaan sumber - sumber keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas2. Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah3. Pengembangan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembanguna di luar PAD4. Optimalisasi	AGENDA <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan manajemen pengelolaan sumber - sumber keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas2. Penguatan penerimaan sumber-sumber keuangan daerah3. Optimalisas alternatif sumber-sumber pembiayaan pembanguna di luar PAD4. Perkuatan kelembagaan

ARAHAN KEBIJAKAN	TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS LOKASI DAN INDIKASI KEBERHASILAN			
	TAHAP I (2005-2009)	TAHAP II (2010 – 2014)	TAHAP III (2015 – 2019)	TAHAP IV (2020 – 2024)
efisien dan efektif (<i>value for money</i>).	4. Peningkatan pembiayaan investasi non fasilitas berbasis ekspor.	an investasi non fasilitas berbasis ekspor.	pembiayaan investasi non fasilitas berbasis ekspor.	pembiayaan investasi non fasilitas berbasis ekspor.

Indikasi dari keberhasilan misi **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** yang ditandai meningkatnya pelayanan publik, menurunnya kerugian Negara, meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya indeks kriminalitas.

